



Implementasi Program Mitigasi Kebakaran Lahan Dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning

Juliana Dwi Aryani¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 10, 2024
Revised July 15, 2024
Accepted July 17, 2024

Kata Kunci:

Implementasi,
Kebakaran,
Pemberdayaan Masyarakat

Keywords:

Implementation,
Fire,
Community Empowerment

ABSTRAK

Masalah kebakaran memiliki dampak yang signifikan di seluruh dunia karena berperan dalam meningkatkan gas rumah kaca dan melepaskan emisi partikulat berbahaya ke atmosfer. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan, namun juga berdampak pada tanah melalui pelepasan panas dan pengendapan abu, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan pasca kebakaran. Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan program unggulan dalam bidang lingkungan yang telah berjalan sejak 2017 melalui Masyarakat Peduli Api (MPA). Program ini muncul dari isu lingkungan berupa karhutla yang terjadi di wilayah Bukit Batu beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kelompok yang hanya bersifat kerelawanan ini tentunya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatannya, serta Desa tidak cukup untuk memberikan gaji bagi anggota MPA. Dengan kurangnya anggaran untuk mendukung kinerja, kelompok MPA sering kali tidak efektif melakukan pemadaman api. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran umum masalah penelitian dan solusinya. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu : komunikasi, sikap/disposisi, sumber daya, struktur birokrasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi program yaitu Wirausaha, Kerjasama, dan Potensi.

ABSTRACT

The fire problem has a significant impact throughout the world because it plays a role in increasing greenhouse gases and releasing harmful particulate emissions into the atmosphere. This not only causes damage to plants and animals, but also impacts the soil through heat release and ash deposition, which can lead to post-fire environmental degradation. The Community Empowerment-based Land and Forest Fire Mitigation Program is a superior program in the environmental sector that has been running since 2017 through the Fire Care Community (MPA). This program emerged from environmental issues in the form of forest and land fires that occurred in the Bukit Batu area in recent years. Previously, this group, which was only a volunteer, certainly did not have a sufficient budget to carry out its activities, and the village did not have enough to provide salaries for MPA members. With a lack of budget to support performance, MPA groups are often ineffective at extinguishing fires. This research uses descriptive qualitative research which provides a general description of the research problem and its solution. This research uses the Policy Implementation theory according to George Edward III (1980)

with four indicators, namely: communication, attitude/disposition, resources, bureaucratic structure. Based on this research, it can be concluded that the implementation of the Community Empowerment-Based Land and Forest Fire Mitigation Program at PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning is going well. Factors that influence program implementation are Entrepreneurship, Cooperation, and Potential.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Juliana Dwi Aryani
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul,
Jakarta, Indonesia
Email: julianaaryani2020@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masalah kebakaran memiliki dampak yang signifikan di seluruh dunia karena berperan dalam meningkatkan gas rumah kaca dan melepaskan emisi partikulat berbahaya ke atmosfer. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan langsung pada tumbuh-tumbuhan dan hewan, namun juga secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tanah melalui pelepasan panas dan pengendapan abu, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan pasca kebakaran. Salah satu wilayah yang sering mengalami kebakaran di Indonesia adalah Provinsi Riau, terutama Kabupaten Bengkalis [1]. Setelah kebakaran besar tahun 1997, kebakaran besar lainnya terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2014, namun kebakaran ini diklasifikasikan sebagai peristiwa luar biasa dan pemerintah menyatakan keadaan darurat [2]. Dari tahun 2012 hingga 2015, kebakaran lahan gambut yang parah menyebabkan asap di Kecamatan Bukit Batu menyebar hingga di Singapura dan Malaysia. Kebakaran hutan terus terjadi di beberapa desa di Kecamatan Bukit Batu. Pasalnya Kawasan ini mempunyai struktur tanah berupa tanah gambut. Berikut informasi tentang lokasi kebakaran selama periode 2013 hingga 2023 di Kabupaten Bengkalis tersedia dalam tabel :

Demi menegakkan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pada pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat menjadi TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya Masyarakat.

Di Kabupaten Bengkalis Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikeluarkan sebagai langkah untuk mendorong perusahaan-perusahaan di daerah tersebut untuk berkontribusi lebih aktif dalam aspek sosial, lingkungan, dan pembangunan lokal. Salah satu Perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan TJSP adalah PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning. Kilang ini merupakan salah satu Perusahaan besar di Kabupaten Bengkalis yang memiliki peran signifikan dalam industri

minyak dan gas. Sebagai Perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar, implementasi TJSP oleh perusahaan ini memiliki dampak yang potensial terhadap perkembangan sosial dan lingkungan di sekitarnya [3]. Dalam Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Pada ayat 22 Peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan sesegera mungkin sebelum kebakaran meluas. Pada ayat 23 mengatur tentang Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan (Dinas LHK, 2019) [4].

Salah satu lokasi kebakaran hutan di Kecamatan Bukit Batu adalah Kelurahan Sungai Pakning yang berada di Kawasan Perkebunan milik warga dan di area lahan milik Pertamina. Kebakaran terjadi pada tahun 2014-2016, membakar lebih dari 30 hektar lahan setiap tahunnya. Kebakaran Perkebunan kelapa sawit disebabkan adanya infiltrasi air dari Semak-semak yang terbakar. Terdapat bukti bahwa Semak-semak tersebut terbakar akibat upaya penduduk setempat untuk membuka lahan baru. Hampir seluruh kebakaran terjadi pada musim kemarau, yaitu pada bulan Februari hingga Maret saat kondisi cuaca sangat panas dan angin berembus kencang. Hal ini membuat gambut dan ranting kering menjadi lebih mudah terbakar [5].

Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan program unggulan dalam bidang lingkungan yang telah berjalan sejak 2017 melalui Masyarakat Peduli Api dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Bekerja sama dengan Program Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan bentukan pemerintah desa yang pada awalnya bertugas menjadi pemadam api setiap terjadi kebakaran hutan, kasus karhutla yang sering terjadi ini menjadikan Desa memerlukan tenaga yang selalu siap jika suatu saat terjadi kebakaran. Masyarakat Peduli Api (MPA) ini tergabung dari 6-10 orang Masyarakat Desa dan 18 orang masyarakat kelurahan dengan berbagai profesi yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dengan sukarela menyatakan kesediaannya untuk melakukan pengendalian sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Program ini muncul dari isu lingkungan berupa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Bukit Batu beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, kelompok yang hanya bersifat kerelawanan ini tentunya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatannya, serta Desa tidak cukup untuk memberikan gaji bagi anggota MPA. Dengan kurangnya anggaran untuk mendukung kinerja, kelompok MPA sering kali tidak efektif melakukan pemadaman api. Kurangnya sumber daya untuk mendukung MPA baik kapasitas anggota dalam menghadapi kebakaran maupun alat yang dibutuhkan. Dengan alasan ini banyak anggota yang memilih untuk mengundurkan diri dari kelompok MPA.

Beberapa hal ini menjadi penyebab kurang efektifnya peran MPA dalam menangani karhutla sehingga memerlukan beberapa perbaikan untuk dapat lebih efektif dalam melakukan pencegahan karhutla maupun tindakan pemadaman karhutla. Alasan lainnya yaitu, kelompok MPA yang ada saat itu kurang dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan pemadaman api sehingga kurang efektif. Kerjasama antar kelompok MPA desa sangat

diperlukan karena karhutla yang terjadi cukup besar dan memerlukan waktu yang lama untuk dipadamkan sehingga membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Hal ini menjadi permasalahan karena tidak adanya koordinasi antar kelompok MPA desa dan kurangnya sumber daya manusia dalam kelompok MPA desa yang memiliki anggota sedikit. Kerjasama dengan berbagai stakeholder juga mampu meningkatkan kapasitas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Sungai Pakning. Kelompok ini merupakan garda terdepan dalam penanggulangan karhutla yang sangat penting diberikan bantuan baik secara peningkatan kemampuan dan perlengkapan untuk menunjang kinerja MPA [6].

Pada tahun 2017, PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning resmi menggandeng MPA, yang kemudian dilanjutkan melakukan pelatihan pemadaman api bagi anggota MPA yang diajarkan langsung oleh HSSE Pertamina. Hal tersebut merupakan Langkah awal yang dilakukan untuk menambah kapasitas para anggota MPA dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan prosedur yang lebih efektif dan lebih aman. Tidak hanya memberikan pengembangan kapasitas melalui pelatihan, sarana dan prasarana juga diberikan kepada kelompok MPA sebagai alat penunjang untuk menghadapi karhutla. Peralatan keselamatan seperti baju *cover all*, Sepatu boot, helm, kacamata, dan sarung tangan juga diberikan kepada MPA, selain itu peralatan seperti mesin pompa air, selang, dan nozzle diberikan untuk setiap kelompok MPA Desa. Pada rentang waktu 2014 – 2015, kebakaran lahan dan hutan melanda wilayah Bukit Batu seluas 86 Hektar yang mengakibatkan kerugian moril dan materil seperti terbakarnya kebun warga, terbakarnya rumah warga, penyakit ISPA hingga warga yang meninggal dunia akibat ISPA. Dampak program ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap pola pemantauan titik api, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, terbentuknya Forum Komunikasi Lintas MPA (FORKOMPA) tahun 2018 oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning dan menurunnya prevalensi penyakit ISPA yang tercatat di Puskesmas Bukit Batu dalam beberapa tahun terakhir. FORKOMPA merupakan MPA-MPA yang awalnya terbentuk dari 4 Desa dan 1 Kelurahan yaitu : Desa Sejangat, Desa Pakning Asal, Desa Sungai Selari, Desa Batang Duku dan Kelurahan Sungai Pakning [10].

Keadaan awal dalam kelompok MPA menunjukkan kurangnya perlengkapan dan kapasitas anggota dikarenakan keterbatasan dana milik pemerintah Desa untuk mengelola kelompok MPA. Sehingga diperlukan bantuan baik pengembangan kapasitas serta perlengkapan yang memadai dan menunjang keselamatan MPA. Kelompok ini merupakan garda terdepan dalam penanggulangan karhutla cukup penting untuk memberikan bantuan baik kemampuan dan perlengkapan untuk menunjang kinerja mereka. Selain pemberian bantuan berupa penambahan kapasitas dan perlengkapan, perusahaan juga memberikan bantuan berupa pembuatan kanal atau embung untuk membantu kelompok MPA dalam memadamkan api, dengan kondisi lingkungan tanah gambut cukup sulit untuk menemukan sumber air. Kejadian karhutla yang sering kali terjadi di lahan gambut yang sulit untuk dijangkau kendaraan pemadam api maka salah satu solusinya adalah dengan membuat kanal air sebagai sumber air untuk pemadaman api. Titik pembuatan embung perlu untuk disebar dan dapat menjangkau banyak area yang berpotensi terkena kebakaran hutan sehingga memberikan kemudahan bagi MPA untuk menjangkau titik api yang berada di Tengah hutan.

Selain dimanfaatkan sebagai pertanian, kemampuan dan kompetensi Masyarakat Peduli Api dalam memadamkan api juga telah diakui berkat kegiatan pendidikan dan sertifikasi

Safetyman yang diikuti oleh 59 anggota MPA dan profesi *Fireman* yang diikuti oleh 10 anggota MPA. Kegiatan ini melahirkan lapangan pekerjaan baru yaitu Profesi *Safetyman* dan *Fireman* yang dapat meningkatkan pendapatan MPB menjadi rata-rata Rp.2.900.000/bulan per-orang. Tujuan utama dibentuknya *Safetyman* adalah untuk mengobservasi *unsafe action* (tindakan tidak aman yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain), *unsafe condition* (kondisi lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya), dan *nearmiss* (kecelakaan yang terjadi atau tidak bisa dihindari) di dalam pekerjaan [7].

Kebakaran lahan dan hutan merupakan permasalahan yang terjadi hampir setiap tahun di wilayah Propinsi Riau yang mana merupakan salah satu propinsi dengan wilayah tanah gambut terbesar. Besarnya wilayah yang terkena dan terdampak karhutla tentunya memerlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganannya. Kelompok MPA juga memerlukan adanya kerjasama oleh antar kelompok MPA desa sehingga dapat memperkuat keberadaan MPA dalam penanggulangan karhutla. Anggota MPA tiap desa yang beragam jumlahnya juga memerlukan kerjasama dengan kelompok MPA dari desa lain untuk dapat mengatasikarhutla. Permasalahan kerjasama dan koordinasi tentunya memerlukan wadah berupa forum atau komunitas yang dapat menampung setiap kelompok MPA sehingga dapat lebih mengenal satu sama lain dan dapat bekerjasama dengan lebih baik.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) Kecamatan Bukit Batu resmi diubah menjadi Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Bencana (FORKOMPBB) Gerbang Laksamana pada tahun 2020. FORKOMPBB sekarang terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan yang diantaranya: Desa Sungai Selari, Desa Pakning Asal, Desa Batang Duku, Desa Sejangat, Desa Pangkalan Jambi, Desa Dompas, Desa Buruk Bakul, Desa Temiang, Desa Sukajadi, Desa Bukit Batu, Desa Lubuk Muda, Desa Temiang, Desa Sepahat, Desa Tanjung Leban, Desa Tanjung Belit dan Kelurahan Sungai Pakning. Pengubahan nama dari Kecamatan Bukit Batu menjadi Gerbang Laksamana di karenakan cakupan daerah yang membawahi MPB di 3 Kecamatan yaitu : Bukit Batu, Bandar Laksamana, dan Siak Kecil.

Kapasitas yang dimiliki oleh kelompok MPA tentunya memerlukan penyegarankeilmuan terkait penanggulangan karhutla sehingga pelatihan dan sertifikasi dapat dilaksanakan secara rutin setiap jangka waktu tertentu. Untuk menjaga kesiap- siagaan MPA, selain diperlukan penyegaran ilmu juga diperlukan pemberian apresiasidari pihak-pihak tertentu untuk menjaga kinerja. Dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh lembaga atau dari pemerintah dapat memberikan peningkatan moral bagi kelompok sehingga merasa diperhatikan oleh pemerintah [9].

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran umum masalah penelitian dan solusinya. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi lisan atau tertulis dari individu atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan mengilustrasikan bagaimana program mitigasi kebakaran lahan dan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian yaitu berupa suatu fakta yang ada agar memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data antara lain yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode wawancara semi-terstruktur di penelitian ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk observasi, pengumpulan dokumentasi, dan wawancara secara bertahap dengan sejumlah informan yang telah dipilih yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning

Pelaksanaan implementasi kebijakan CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. CSR telah mendapatkan tujuan dari pembentukan FORKOMP Gerbang Laksamana. Bersama anggota MPB dan Pemerintah setempat, Program ini berhasil mengurangi kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kelurahan Sungai Pakning serta meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh CDO CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning Rizal, bahwa mereka mengklaim dengan adanya program ini telah berhasil membantu masyarakat setempat mengurangi karhutla dan memulihkan ekosistem gambut. Melalui wawancara dengan peneliti dan menjelaskannya sebagai berikut :

“kami mengklaim bahwasannya dengan program yang kami jalankan ini, yaitu Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat bersama Masyarakat Peduli Api yang telah kami bina dan kami berikan pelatihan serta membangun Arboretum Gambut Marsawa untuk memulihkan ekosistem gambut mampu mengurangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sungai Pakning ini” CDO Pertamina Rizal Indra, 26 November 2023

Berdasarkan penjelasan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dapat kita lihat faktor-faktor yang kemudian menjadi indikator keberhasilan implementasi Program yang dilaksanakan oleh CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning. Berdasarkan teori George Darwin III, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu melalui: Komunikasi, Sikap, Sumber Daya, dan struktur Birokrasi dilihat dari pelaksanaan Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi dari pelaku atau aktor kejadian untuk mendukung dari implementasi kebijakan publik dan diharapkan bisa menjadi edukasi literasi kebijakan. Berikut bentuk komunikasi yang dilakukan oleh CSR PT Pertamina RU II Sungai Pakning :

1. *Benchmarking*/Studi Banding di Desa Wisata Mangrove Kulon Progo, Sentra Kerajinan Serat Alam, Desa Wisata Pentingsari, dan Komunitas Radio Lintas Merapi di Yogyakarta

yang diikuti Kelompok Masyarakat Binaan, Kepala Desa, Camat Bukit Batu, dan Perwakilan DPRD Riau [8].

2. *Sharing* program CSR terkait penanganan karhutla oleh MPA Bersama Pertamina Hulu Negeri Jambi.
3. Webinar penanganan bencana : peran industri dan multisector.
4. Kunjungan ke rumah dinas Gubernur Riau Syamsuar atas pencapaian Kalpataru 2020 oleh anggota MPA.

Dari beberapa pernyataan yang telah peneliti paparkan, komunikasi yang dilakukan Pegawai CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II antara Perusahaan dengan pemerintah, Perusahaan dengan Masyarakat, serta Perusahaan dengan pemerintah dan Masyarakat yang terlibat dalam Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sudah sangat baik. Tersedianya alat komunikasi juga sebagai bentuk keberhasilan Pertamina agar MPA bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak lainnya untuk penanganan bencana karhutla.

3.1.2 Sikap/Disposisi

Sikap merupakan kecenderungan bawaan individu untuk bertindak dengan pola-pola tertentu terhadap suatu objek, yang dipengaruhi oleh pandangan dan perasaan individu terhadap objek tersebut. Dengan mengembangkan program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terutama di Kelurahan Sungai Pakning, para karyawan juga ikut berpartisipasi membina masyarakat untuk melakukan pelatihan dan kelestarian hutan, anggota MPB juga mempelajari struktur dan kondisi daerah kebakaran ketika proses pemadaman, dan memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tak lepas dari modal sosial yang dimiliki masyarakat, yaitu kepercayaan (*Trust*). Kepercayaan antara masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning masih sangat baik. Begitu juga kepercayaan anggota MPA dengan PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning.

Peneliti menyimpulkan bahwa CSR bersikap kompeten dan jujur dalam melaksanakan kebijakan tanggung jawab sosial Perusahaan dan lingkungan. Permasalahan Masyarakat yang pada awalnya acuh tak acuh terhadap lingkungan membuat CSR ekstra memberikan edukasi kepada Masyarakat dengan membentuk pola pikir Masyarakat agar memiliki sikap peduli terhadap alam dan lingkungan, sehingga Pertamina bisa menjalankan program dengan sebaik-baiknya.

3.1.3 Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. kebijakan.

1. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara program Mitigasi Karhutla yang dibina oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning berbasis pemberdayaan masyarakat, sumber daya dari Pertamina dikelompokkan berdasarkan tahun sebagai berikut :

- a. Perintisan dan perencanaan program oleh Pertamina untuk menggandeng MPA (2017-2018)

- b. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha bagi anggota MPA (2019-2021)
 - c. Replikasi dan pengembangan kemitraan serta berjalannya kegiatan rutin MPA (2022-2023)
2. Sumber daya Finansial

Dana CSR adalah dana yang diambil dari keuntungan Perusahaan yang disisihkan dengan jumlah besaran sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bersama informan, dana CSR berasal dari 2% dana yang diberikan oleh Perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Perusahaan. Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat merupakan program nonprofit yang dijalankan CSR sehingga PT Kilang Pertamina Internasional RU II yang tidak mendapatkan keuntungan material dari program ini.

Tabel 3. Anggaran Dana CSR PT KPI RU II Sungai Pakning untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan Tahun 2020

No	Program CSR	Jumlah Anggaran
1.	Pertanian Nanas Terintegrasi	Rp. 225.000.000,-
2.	Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.000.000,-
3.	Pertanian Holtikultural Lahan Gambut	Rp. 150.000.000,-
4.	Budidaya Madu Hutan Rumah Lingkungan	Rp. 170.000.000,-
5.	Sekolah Cinta Gambut	Rp. 300.000.000,-
6.	Konservasi dan Revitalisasi Mangrove	Rp. 275.000.000,-
7.	Budidaya Perikanan	Rp. 150.000.000,-
8.	Posyandu Sehati	Rp. 100.000.000,-
Jumlah		Rp. 1.670.000.000,-

Sumber : Dokumen PT Pertamina RU II Sungai Pakning

3.1.4 Struktur Birokrasi

Organisasi dibangun dan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditentukan dengan tetap mempertahankan dan memperluas kegiatan organisasi di bidang tertentu sebagai respons terhadap lingkungan. Penerapan kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan, maka akan menyebabkan tidak efektifnya kebijakan dan menghambat implementasi kebijakan. Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning membentuk tim implementasi program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning

CSR mengembangkan program mitigasi kebakaran hutan dan lahan dimulai dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemetaan sosial. Pemetaan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan suatu masyarakat, potensi sumber daya lingkungan dan kondisi sosial sehingga tujuan dapat tercapai. Ter khususnya, alokasi sumber daya keuangan dan manusia yang digunakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin.

3.2.1 Wirausaha

Peningkatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari adanya program pemberdayaan MPA, hal ini menjadi isu yang cukup kuat disamping permasalahan lingkungan dan sosial. Kondisi ekonomi personal MPA/MPB yang kurang juga dapat mempengaruhi kinerjanya dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Terlebih anggaran yang diberikan oleh Desa tidak mencukupi bagi operasional MPA sehingga sumber daya yang ada tidak mencukupi.

3.2.2 Kerjasama

Kolaborasi antar pihak merupakan salah satu kunci sukses program penanganan kebakaran hutan karena dengan hal tersebut akan terciptanya Kerjasama yang mana diperlukan dalam penanganan karhutla. Selain dampak terhadap kerjasama antar pihak, program perlu memunculkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat sadar akan keberadaan program. Sebagai program yang memiliki akar dari permasalahan kebakaran hutan, tentunya harus memberikan dampak bagi lingkungan yaitu terbebasnya wilayah Sungai Pakning dari kebakaran hutan.

3.2.3 Potensi

Dampak yang dihasilkan oleh adanya program tidak hanya berupa dampak secara sosial, lingkungan dan ekonomi saja. Akan tetapi, juga dampak berbentuk prestasi yang diterima oleh anggota MPA. Kerja keras para MPA telah menghadirkan banyak penghargaan seperti diantaranya penghargaan Kalpataru dan Wana Lestari yang diterima oleh MPA yang dibina oleh Perusahaan. Tokoh yang mampu menjadi penggerak memang sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu program agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Implementasi CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning berjalan dengan baik berdasarkan pengaruh dari komunikasi yang baik dan efektif antara Perusahaan dengan pemerintah, Perusahaan dengan Masyarakat, serta Perusahaan dengan pemerintah dan Masyarakat yang terlibat dalam program. Sumber Daya Manusia yang telah diperkuat dengan melakukan pelatihan dan pengembangan serta bantuan dana dan alat yang memadai untuk membina MPA membuka usaha. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang Program Mitigasi Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PT Kilang

Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning mempunyai tiga faktor diantaranya adalah Wirausaha, Kerjasama dan Potensi.

REFERENSI

- [1] Udin. (2018). Gambut Berdikari PT Kilang Pertamina. Gramedia.
- [2] Badri, M., Lubis, D. P., Susanto, D., & Suharjito, D. (2018). Sistem Komunikasi Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v19i1.1266>
- [3] Peraturan Perundang-Undangan
- [4] Dinas LHK, P. R. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. 1–39
- [5] Sudarmanto, Eko and Revida, E. and Z. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat : Pembangunan dan Pemberdayaan.
- [6] Oktina, D. A., Sari, E. S., Intan Angelina Sunardi, I. A., Hanifah, L. N., & Sanjaya, V. F. (2020). Pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt. Pertamina (Persero) Tahun 2018. *Competence : Journal of Management Studies*, 14(1), 184–202. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i1.7170>
- [7] Peran dan Tanggung Jawab Utama Safety Man dalam Lingkungan Kerja. (n.d.). Indonesia Safety Cneter. <https://indonesiasafetycenter.org/peran-dan-tanggung-jawab-utama-safetyman-dalam-lingkungan-kerja/>
- [8] Dumai Pos News. (2020). CSR Pertamina RU II Sei Pakning ke Yogyakarta, Kembangkan Potensi Wisata Bukit Batu. <https://www.dumaiaposnews.com/2020/01/csr-pertamina-ru-ii-sei-pakning-ke-yogyakarta-kembangkan-potensi-wisata-bukit-batu/>
- [9] Pertamina. (2018). CSR Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut. Pertamina.
- [10] Safira, A. (2023). Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Pertamina RU II Sungai Pakning Dalam Membangun Arboretum Gambut Marsawa Tahun 2020. 10, 1–15.